Ratusan Massa Desak Pemerintah Hentikan .....

Dari Halaman 1

Tano Batak. Aksi damai ini berlangsung sejak pagi hari dengan orasi, poster-poster kritis, dan simbol-simbol budaya adat Batak.

Massa aksi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TPL terhadap masyarakat adat Sihaporas, serta mengecam lambannya negara dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun.

Kekerasan terbaru terjadi di Sihaporas, dimana warga tuka. Sehingga dalam pernyataan sikapnya, massa aksi mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TPL terhadap masyarakat adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun.

Insiden tersebut terjadi pada Senin, 22 September 2025, di mana massa yang diduga bagian dari TPL menyerang warga yang mempertahankan lahan adat mereka.Sedikitnya 33 orang dilaporkan terluka—18 di antaranya perempuan, 15 laki-laki.

Bahkan, seorang anak penyandang disabilitas turut menjadi korban setelah dipukul di bagian kepala. Dari total korban, sepuluh mengalami luka serius, sementara sisanya mengalami memar dan lebam akibat pukulan di kepala dan tubuh.

"Ini bukan sekadar konflik lahan. Ini adalah bentuk kekerasan struktural yang dilakukan perusahaan dengan dukungan aparat terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan haknya," ujar salah satu orator aksi.

Massa juga menganggap PT TPL Penjajah Tanah Batak. Lebih lanjut, massa aksi menyoroti luasnya konsesi PT TPL yang mencapai lebih dari 150.000 hektare di wilayah Tano Batak. Menurut mereka, sebagian besar konsesi itu merupakan hasil dari perampasan tanah adat sejak era 1980-an.

Hingga kini, 77% wilayah konsesi itu diklaim masyarakat adat sebagai tanah ulayat yang dirampas tanpa persetujuan sah."PT TPL bukan hanya merusak hutan, tapi juga merampas identitas dan ruang hidup masyarakat adat. Dalam konteks ini, TPL kami anggap sebagai penjajah tanah Batak. Ini bukan penjajahan dalam arti kolonial lama, tapi bentuk kolonialisme internal yang dilegalkan oleh negara," tegas salah satu tokoh adat dalam orasinya.

Empat Tuntutan

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD Sumut dan Pemerintah Pusat: Hentikan Tindakan Represif dan Intimidatif: Mengecam keras tindakan represif, intimidatif, dan diskriminatif aparat terhadap masyarakat adat dan petani dalam konflik agraria.

Selain itu negara harus melindungi warga, bukan menjadi alat kekerasan korporasi. Begitu juga segera bentuk Undang-Undang Reforma Agraria: serta mendesak pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Reforma Agraria yang sejati, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat, tapi benar-benar menata ulang struktur penguasaan dan distribusi tanah secara adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

Lalu, sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat: Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar hak-hak komunitas adat diakui dan dilindungi secara hukum, termasuk pengakuan atas wilayah adat mereka. Begitu juga cabut Izin dan hentikan Operasi PT TPL:

"Mendesak pemerintah untuk mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan mengembalikan seluruh wilayah adat yang telah dirampas kepada masyarakat adat,"teriak.massa.

Hingga sore hari, massa aksi belum mendapatkan tanggapan resmi dari perwakilan DPRD Sumut. Perwakilan massa diterima oleh staf sekretariat, namun tidak satupun anggota dewan yang menemui massa secara langsung, hal ini memicu kekecewaan di kalangan demonstran."Kami datang jauh-jauh dari kampung, membawa luka dan harapan, tapi kami hanya diterima oleh pegawai. Di mana para wakil rakyat?" tanya salah satu peserta aksi dengan nada geram.

Massa aksi menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti di halaman DPRD Sumut. Mereka menyerukan solidaritas yang lebih luas dari berbagai elemen masyarakat untuk mendorong keadilan agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia**.(A-06)**

Lailatul Badri 'Naik Darah'.....

Dari Halaman 1

"Jadi jelas belum layak berjalan," kata politisi PKB itu saat mendebat perwakilan dari Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan, Affan Affandi.

Ia juga meminta Dinas Perkim Cikataru Kota Medan untuk tidak mengeluarkan SLF jika belum memenuhi beberapa persyaratan.

Politisi PKB yang akrab disapa Lela ini juga menegaskan, jika sebuah apartemen tidak memilik SLF maka apartemen belum layak jalan.

"Kami dari legislatif sebagai Badan Pengawas minta ketegasan dinas buat sanksi admistratif untuk The CityView Medan Condominium. Kami tunggu beberapa hari ini," tegas Lela, seraya menyatakan, pihaknya bekerja memiliki alasan kuat, dalam hal ini Perwal No 31/ Tahun 2019.

"Tolong buat sanksi administrasi saudara. Jangan iya iya saja. Kalian yang tidak kerja, kami yang kena," bentaknya.

Diketahui, RDP dipimpin Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak dan turut dihadiri Lurah Sukadamai, Sekcam Medan Maimun Eva Lucia br Simamora, pihak Dinas Perkimcikataru Affan, Dinas Perizinan, Dinas Perhubungan Rianto, pihak BWSS dan sejumlah warga Medan Maimun**.(A-10)**

Korban Keracunan MBG Kembali Terjadi .....

Dari Halaman 1

Cipongkor dan 100 pelajar lainnya tercatat ada di Puskesmas Citalem.

"Kondisinya seperti itu, tentu sekali lagi tidak kita harapkan. Tapi, faktanya, ada musibah, keracunan. Keluhannya pada umumnya itu mual, sesak, pusing, lemas," ucapnya.

Herman mengaku mendatangi Posko Cipongkor untuk memastikan semua anak tertangani dengan baik, mulai dari perawatan hingga memastikan fasilitas layanan kesehatan pun agar terjamin.

"Teman-teman bisa lihat, ambulans kami kerahkan, tenaga medis kami kerahkan, bukan hanya dari KBB tapi juga dari kota Bandung, dari kota Cimahi dan dari kabupaten Bandung," kata dia.

Soal desakan dari orang tua para pelajar yang tidak ingin anaknya menjadi korban program MBG, Herman mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut ke BGN.

"Nah, kalau terkait itu, tentu kami akan laporkan ke BGN, karena otoritasnya adalah di BGN, yang jelas, Pemda Provinsi Jawa Barat mendukung program MBG," kata dia.

"Pak Gubernur mendukung program ini. Terkait teknisnya, ada kekurangan dan lain sebagainya, tentu kan harus bereskan evaluasi," sambung dia.

Herman juga bicara soal status KLB yang ditetapkan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Selama KLB Bupati Jeje menyatakan bakal menutup dapur-dapur di Cipongkor.

Herman berkata penutupan SPPG di Cipongkor hanya dilakukan ke dapur yang menghidangkan makanan saat keracunan Senin lalu.

"Ini beda SPPG yang hari Senin. (Dan penutupan SPPG) itu otoritas dari BGN," katanya**. (cnni/js)**

Serikat Tani Diterima Pimpinan DPR .....

Dari Halaman 1

IV bidang Pertanian dan Kehutanan. Selain mereka audiensi turut dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Mereka seperti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, hingga Kepala Staff Kepresidenan M Qodari.

"Yang saya hormati teman-teman dari perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan organisasi rakyat yang hari ini datang ke DPR," kata Dasco membuka audiensi.

Total ada 16 perwakilan organisasi tani dan nelayan yang hadir pada kesempatan tersebut, termasuk perwakilan KPA, dengan total peserta sekitar 100 orang. Mereka sebagian besar berasal dari Jawa Barat dan Banten.

"Kami pada hari ini tentu berterima kasih kepada pimpinan DPR yang sudah memperkenankan untuk berdialog, dan memfasilitasi juga untuk bertemu dengan para menteri," kata Sekjen KPA, Dewi Kartika.

Dia menyebut Hari Tani Nasional sangat bersejarah bagi kaum tani karena dianggap sebagai lebaran bagi mereka.

Dewi pada kesempatan itu menyatakan sikap bersama dengan judul 'Rakyat dan Kekayaan Bangsa Setiap Hari Dijarah, Presiden dan DPR RI Harus Segera Menjalankan Reforma Agraria Sekarang Juga".

Dia menilai isu reforma agraria dan pertanian saat ini masih jauh dari ingat biar pemberitaan. Termasuk dalam gelombang unjuk rasa 25-31 Agustus lalu.

"Sebenarnya yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat, kekayaan alam di pedesaan. Ini adalah isu-isu, ini adalah penjarahan nyata di lapangan bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya," kata Dewi**. (cnni/js)**

Bobby Berhasil Bawa Sumut 100 Persen .....

Dari Halaman 1

delapan bulan. Ini menunjukkan komitmen Pak Gubernur memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat," ujar Kadis Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, Selasa (23/9).

Direktur RSU Haji Medan, Sri Suriani Purnamawati menegaskan pihaknya siap mendukung penuh implementasi UHC. "Pasien cukup membawa KTP, data langsung terverifikasi tanpa berkas tambahan. Kami juga menyiapkan loket khusus Probis agar pelayanan lebih cepat dan sederhana," katanya.

Tenaga medis juga menyambut baik program ini. "Sebagai tenaga medis, kami merasa bangga dan bersyukur karena melalui UHC semakin banyak masyarakat yang bisa berobat tanpa terbebani biaya. Melihat pasien datang dengan tenang, tidak lagi khawatir soal biaya, membuat kami lebih termotivasi memberikan pelayanan terbaik," ujar Dina Marlia, S.Kep Ners, Perawat RSU Haji Medan.

Seorang pasien di RSU Haji Medan, Mulyana, 45, mengakui proses pelayanan Probis di RS ini sangat mudah, cepat dan lancar. "Saya sebelumnya tidak memiliki jaminan kesehatan. Saya langsung ke RSU Haji Medan karena demam dan badan menggigil akibat sakit tipes dan asam lambung. Saya masuk ke UGD hari Sabtu malam (20/9) dan langsung ditawarkan program UHC ini cukup menunjukkan KTP dan KK saja," ujar Mulyana yang keseharian bekerja sebagai penjaga toko di Medan.

Prosesnya sangat cepat dan Mulyana mengakui dirinya langsung mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Dia berharap program ini dapat berjalan dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. "Pelayanan RSU Haji Medan juga sangat baik, saya puas sekali. Terima kasih kepada Bapak Bobby, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan," kata Mulyana.

Keluarga pasien di RSU Haji Medan juga mengakui program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Rizki Ramadhan, 25 yang membawa ibunya Nuraini Hasibuan, 60 untuk rawat inap menggunakan program UHC mengatakan, ketika dia sampai ke RS, pihak rumah sakit langsung menangani ibunya dengan cepat.

"Awalnya ibu saya sesak nafas, batuk dan ada diabetesnya. Saya bawa ke RS dan langsung ditawari program UHC karena saya tidak punya BPJS, prograrm ini cukup hanya dengan KTP dan KK saja. Ini baru pertama sekali saya menggunakan program ini, sangat bagus dan bermanfaat, pelayanannya juga memuaskan," kata Rizki.

Pengamat kesehatan Destanul Aulia menilai keberhasilan ini bukan hanya capaian teknis, melainkan bukti kepemimpinan visioner. "UHC Sumut tercapai bukan dengan menambah beban fiskal, melainkan dengan strategi cerdas, efisiensi anggaran, dan kolaborasi. Bobby menunjukkan bahwa keterbatasan justru bisa menjadi katalis percepatan program," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan berobat cukup dengan KTP juga menghapus hambatan birokrasi dan meningkatkan pengalaman pasien. "Ini wujud nyata kepemimpinan muda yang pro-rakyat dan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang adil, mudah, dan bermutu bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Dengan UHC, masyarakat Sumut kini tak perlu lagi khawatir soal biaya ketika berobat. Cukup tunjukkan KTP, layanan kesehatan dapat diakses secara mudah, cepat, dan merata. **(A-05)**

Kemacetan Bukan Takdir .....

Dari Halaman 1

menunggu. Semua ingin menang, yang terjadi justru kekalahan bersama: macet total.

Anehnya, di tengah situasi semacam itu, kita jarang sekali melihat aparat lalu lintas hadir. Satlantas Polrestabes Medan maupun Satlantas Polda Sumut seolah enggan turun tangan. Padahal, jika kita kembali membaca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas polisi lalu lintas jelas, yakni mengatur, menjaga kelancaran, memberi pelayanan, bahkan menindak pelanggaran. Kehadiran mereka di simpul-simpul macet bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.

Memang benar, badan jalan di Tembung sempit, volume kendaraan kian meningkat, sementara akses alternatif tak bertambah. Tetapi itu tidak lantas menjadi alasan membiarkan rakyat berhadap-hadapan tanpa kendali. Polisi lalu lintas seharusnya hadir sebagai pengurai. Kalau ada aparat berdiri di tengah simpang, angkot tak lagi main serobot, sepeda motor tak lagi semaunya, dan pengendara terpaksa patuh. Itu logika sederhana yang sudah terbukti di banyak tempat.

Yang menyedihkan, kekosongan aparat itu justru diisi oleh "pak ogah". Mereka dengan seenaknya mengatur arus kendaraan, tentu bukan demi ketertiban, melainkan demi recehan. Negara absen, peran itu diambil oleh pihak yang tak punya otoritas. Marwah hukum jatuh di persimpangan jalan.

Satlantas Polda Sumut dan Polrestabes Medan tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan klasik terkait keterbatasan personel. Rakyat tidak minta muluk-muluk, tidak juga menuntut teknologi canggih seperti kamera tilang elektronik di setiap sudut. Yang rakyat minta hanya kehadiran nyata. Satu dua petugas berdiri di jam sibuk sudah cukup memberi rasa tertib dan menurunkan tensi kemacetan.

Dalam Islam, amanah adalah hal yang agung. Rasulullah SAW bersabda bahwa bila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran. Tugas polisi lalu lintas bukan sekadar profesi, melainkan amanah untuk menjaga keteraturan hidup masyarakat. Menertibkan lalu lintas sejatinya bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang berarti mengajak kepada kebaikan, mencegah kekacauan. Maka ketika aparat abai, yang hilang bukan hanya kelancaran jalan, melainkan juga rasa keadilan rakyat.

Kalau hari ini polisi lalu lintas terus lalai, maka kemacetan Tembung dan sekitarnya akan tetap jadi "warisan" tahunan. Dan jangan salahkan rakyat bila suatu saat kehilangan hormat pada aparat, karena mereka lebih sering melihat "pak ogah" daripada polisi resmi.(*)

Prabowo 'Gebrak' .....

Momen Prabowo menghentakkan meja terlihat saat dia berbicara soal RI ketika berada di bawah penjajahan, kondisi kelaparan di Indonesia, sampai penyelesaian konflik dengan solusi dua negara di Palestina.

Pada menit-menit pertama pidatonya, Prabowo menghentakkan mimbar pidato saat berbicara soal rakyat Indonesia yang selama berabad-abad berada di bawah penindasan dan perbudakan penjajah. Presiden bahkan menyebut rakyat Indonesia pernah diperlakukan lebih rendah dari anjing di tanah air sendiri.

"Negara saya tahu rasa sakit ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih rendah dari anjing di tanah air kami sendiri," kata Prabowo.

"Kami, rakyat Indonesia, tahu apa artinya ditolak keadilan dan apa artinya hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama," lanjutnya.

Prabowo kembali menghentakkan mimbar saat menceritakan perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Dia mengatakan di saat itu lah, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama RI dan memberikan bantuan.**.(cnni/js)**

Buruh Kritik Program .....

Dari Halaman 1

yang menurutnya kurang mampu menyerap tenaga kerja formal dengan gaji layak.

"Penyerapan tenaga kerja yang sekarang terjadi kan di sektor informal. Misal MBG, betul MBG menyerap tenaga kerja, tapi informal," kata Said di Sofyan Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (24/9), melansir detikfinance.

Said menjelaskan sebagian besar pekerja di dapur umum MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berasal dari sektor informal, yang berarti mereka tidak mendapatkan penghasilan tetap setara upah minimum provinsi (UMP).

Sementara itu, kesempatan kerja di sektor formal yang menawarkan gaji layak justru menurun akibat berbagai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Banyak PHK di mana-mana. Banyak orang kehilangan daripada pendapatannya," ujarnya.

Ia menambahkan pekerja yang terdampak PHK kerap terpaksa beralih ke pekerjaan informal, misalnya sebagai pengemudi ojek online (ojol), yang masuk kategori gig worker. Pekerjaan ini tidak memberikan pendapatan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Orang kerja di sektor ojol misal, itu kan gig worker yang tidak jelas, itu dianggap penyerapan tenaga kerja. Padahal mereka pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan," tutur Said.

Wartawan telah berupaya menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk meminta pendapat dan penjelasan terkait klaim Said Iqbal ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang. **(cnni/js)**

Haruskah TPL Ditutup?

Dari Halaman 1

publik karena konflik lahan dengan masyarakat adat di sekitar Danau Toba dan Tapanuli. Banyak komunitas adat mengklaim tanah ulayat mereka berubah fungsi menjadi hutan tanaman industri eukaliptus tanpa persetujuan.

Perselisihan ini menimbulkan ketegangan sosial, bahkan beberapa kali memicu aksi demonstrasi, bentrok, dan kriminalisasi aktivis lingkungan.

Selain konflik agraria, TPL dituding memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Model perkebunan monokultur eukaliptus dianggap mengurangi keanekaragaman hayati, mengubah ekosistem hutan tropis, dan berpotensi merusak tata air.

Tidak sedikit pihak yang menuding limbah industri pulp mencemari sungai-sungai di sekitar kawasan pabrik.

Bagi kelompok pro-lingkungan dan masyarakat adat, penutupan TPL adalah solusi tegas. Mereka beranggapan bahwa keberadaan perusahaan justru lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Dengan menutup TPL, diharapkan lahan adat dapat kembali ke masyarakat, kerusakan lingkungan dapat dihentikan, dan konflik sosial bisa mereda.

Argumen ini diperkuat dengan semangat keadilan ekologis. Lingkungan yang rusak tidak hanya berdampak pada generasi hari ini, tetapi juga pada generasi mendatang. Jika degradasi ekosistem Danau Toba terus terjadi, risiko jangka panjangnya akan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi sesaat.

Di sisi lain, ada pihak yang menilai bahwa menutup TPL bukanlah langkah bijak. Perusahaan ini menyerap ribuan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Industri pulp juga menjadi salah satu sektor ekspor yang menyumbang devisa. Jika ditutup, akan ada dampak ekonomi serius, terutama bagi pekerja yang bergantung pada perusahaan tersebut.

Selain itu, keberadaan TPL dilihat sebagai investasi jangka panjang yang bisa memperkuat industri kehutanan nasional. Menutupnya bisa memberi sinyal negatif terhadap iklim investasi di Sumatera Utara. Sebagian pihak berpendapat, yang lebih tepat adalah memperbaiki tata kelola perusahaan, bukan menutup total.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan TPL bukan sekadar hitam-putih. Penutupan bisa menyelesaikan sebagian masalah, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama bagi lapangan kerja.

Sementara mempertahankan perusahaan tanpa perubahan berarti membiarkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan terus berlanjut.

Karena itu, jalan tengahnya adalah reformasi mendalam. Pemerintah perlu memastikan adanya audit lingkungan yang ketat dan transparan terhadap TPL.

Konflik tanah adat harus diselesaikan melalui mediasi yang adil, dengan mengakui hak masyarakat adat sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan hutan adat.

Selain itu, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus benar-benar dirasakan masyarakat sekitar, bukan sekadar formalitas.

TPL adalah cermin dari persoalan klasik pembangunan di Indonesia: tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Menutup atau mempertahankan perusahaan hanyalah dua ujung ekstrem. Solusi yang lebih arif adalah menata ulang hubungan industri dengan masyarakat dan lingkungan.

Jika TPL mampu membuktikan komitmen pada keberlanjutan, menghormati hak-hak adat, dan memperbaiki praktik lingkungannya, maka keberadaannya bisa tetap diterima.

Namun, jika pola lama terus dipertahankan, desakan untuk menutup perusahaan akan selalu bergema. Pada akhirnya, masa depan TPL bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman: keberlanjutan dan keadilan ekologis.(*)